

**IMPLEMENTASI PERAN KOMITE MADRASAH
DALAM PELAKSANAAN MANAJAMEN BERBASIS
MADRASAH (MBM) DI MA MA’ARIF KEPUTRAN
KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN
PRINGSEWU**

Nurjanah¹

Damrah Khoir²

Nurul Hidayati Murtafi’ah³

Email: nurzanna0208@gmail.com

Diterima:	Revisi:	Disetujui:
02/07/2022	17/07/2021	09/08/2022

ABSTRACT

The background of this research is about the role of madrasah committee in the implementation of Madrasah-Based Management at Ma. Ma’arif Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. The role of the school committee in relation to improving the quality of educational services is as an advisory agency, supporting agency (supporting educational service activities), controlling agency (controlling educational service activities), mediator (liaison or linking communication between the community and the government). This study aims: To determine the role of the madrasa committee as an advisory agency, as a supporting agency, as a controlling agency and as a mediator in implementing SBM in Ma. Ma’arif Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

This study used descriptive qualitative method. This research was conducted at Ma. Ma’arif Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Data sources consist of primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data using source triangulation and technique/method triangulation.

¹ Mahasiswa Pascasarjana IAI An Nur Lampung

² Dosen IAI An Nur Lampung

³ Dosen IAI An Nur Lampung

Based on the results of this study, it can be concluded that the Madrasah Committee at Ma. Ma'arif Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu in the implementation of MBM includes: the role of an Advisory agency (provider of considerations), as a supporter (supporting agency) in the implementation and improvement of the quality of education in Ma. Ma'arif Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu through MBM, as a controller in various madrasa policies and decisions, as well as as a Mediator (liaison or link communication between the community and the government). This study recommends that the school committee can be a liaison between schools and the community effectively and efficiently in order to realize quality schools based on madrasah-based management (MBM).

Keywords: *The Role of the Madarasah Committee, Madrasah-Based Management*

A. Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian dalam beberapa tahun disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah era pemerintah yang sentralisis telah berakhir. Sistem pemerintahan telah berubah menjadi era pemerintah yang menganut asas desentralisasi atau otonomi. Hampir semua urusan pemerintah telah diotonomikan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota.⁴

Hal ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah, dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui otonomi daerah, hubungan Madrasah dengan masyarakat secara education and cultural khususnya orang tua murid dan

⁴ Suparlan, *Manajamen Berbasis Madrasah*, (Jakarta : Bumi aksara, 2014), h. 4.

masyarakat sekitar Madrasah juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada Madrasah. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Madrasah atau Majelis Madrasah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.
- b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang mandiri.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah.⁵

Keberadaan komite Madrasah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite Madrasah ditingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Madrasah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite Madrasah.⁶

⁵ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 109

⁶ Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 92

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen) tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat Madrasah adalah sebagai berikut :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan.⁷

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka komite Madrasah mempunyai peran dan fungsi. Peran yang dijalankan Komite Madrasah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat.⁸

Keberadaan komite Madrasah merupakan bagian dari pewujudan manajemen berbasis Madrasah yang melibatkan berbagai komponen, termasuk masyarakat dan wali murid. Peran komite Madrasah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali

⁷ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 109

⁸ *Ibid*, h. 110

komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah). Berikut penulis paparkan data RAPBS di Ma. Ma'arif Keputran sesuai dengan peranan-peranan komite :

Tabel 1.1
Indikator Peran Komite Madrasah di Ma. Ma'arif Keputran

Peran Komite Madrasah	Fungsi Manajemen Pendidikan	Indikator Kinerja
1. Badan Pertimbangan (Advisory Agency)	1. Perencanaan Madrasah	a. Memberikan masukan untuk menyusun RAPBS b. Menyelenggarakan Rapat
	2. Pengelolaan Sumber Daya pendidikan	a. Memberikan pertimbangan tentang tenaga pendidikan yang dapat diperbaikkan di Madrasah b. Memberikan pertimbangan tentang sarana prasarana yang dapat diperbaikkan di Madrasah c. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di Madrasah
2. Badan Pendukung (Supporting agency)	1. Pengelolaan Sumber Daya	a. Memantau kondisi Ketenagaan pendidikan di Madrasah b. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di Madrasah
	2. Pengelolaan Anggaran	a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di Madrasah b. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di Madrasah

		c.	Membolerasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di Madrasah
	3. Pengelolaan Sarana dan prasarana	a.	Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di Madrasah b. Memobilisasikan bantuan sarana dan prasarana di Madrasah
3. Badaan Penghubung (<i>mediator agency</i>)	1. Perencanaan	a.	Menjadi penghubung antara komite Madrasah dengan masyarakat, komite Madrasah dengan Madrasah dan komite Madrasah dengan dewan pendidikan b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan
	2. Pelaksanaan program	a.	Mensosialisasikan kebijakan dan program Madrasah pada masyarakat b. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap Madrasah
	3. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	a.	Mengidentifikasi kondisi sumber daya di Madrasah b. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di Madrasah c. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat
4. Badan Pengontrol (<i>Controling agency</i>)	1. Memantau <i>output</i> Pendidikan	a.	Memantau hasil ujian akhir b. c. d. Memantau angka partisipasi Madrasah
	2. Memantau pelaksanaan program Madrasah	a.	Memantau penjadwalan program Madrasah b. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Madrasah

		c. Memantau <i>stake-holders</i> pendidikan dalam pelaksanaan program Madrasah
--	--	--

Sumber : (Engkoswara, 2011: 300-303)

Berdasarkan tabel 1.1 indikator kinerja komite Madrasah, peran komite Madrasah ada empat yaitu komite Madrasah sebagai badan pertimbangan, komite Madrasah sebagai badan pendukung, komite Madrasah sebagai badan pengontrol, dan komite Madrasah sebagai badan penghubung atau mediator. Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan yaitu komite Madrasah ikut terlibat dan memberikan masukan-masukan ketika pihak Madrasah akan mengadakan suatu program-program di Madrasah. Komite Madrasah sebagai badan pendukung yaitu komite Madrasah selalu mendukung program di Madrasah yang kaitannya untuk memajukan mutu pendidikan di Madrasah.

Komite Madrasah sebagai badan pengontrol yaitu komite Madrasah senantiasa mengontrol keadaan Madrasah. Komite Madrasah sebagai badan penghubung yaitu ketika pihak Madrasah akan mengadakan program-program di Madrasah maka komite Madrasah selalu terlibat dan menjadi badan penghubung atau mediator antara orang tua siswa, masyarakat, maupun pemerintah.

Sebagai institusi pendidikan peran komite sangat penting untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran di Madrasah. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran Madrasah dalam pengelolaan Madrasah agar menjadi efektif dan efisien kepala Madrasah harus menerapkan Manajamen Berbasis Madrasah (MBM).⁹

Manajemen yang diinginkan dalam dunia pendidikan bila dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat As-Saf ayat 4, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الظِّلِّيْكُمْ يُقْتَلُوْكُمْ فِي سَيِّلِهِ صَفَا كَانُوكُمْ مُّتَّيَّنِيْنَ
مَرْضُوْصٌ

⁹ Barnawi dan Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar : Ruzz Media, 2017),h.11

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.*¹⁰

Dari ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa barisan yang teratur yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas mengindikasikan sebuah organisasi yang memiliki manajemen yang baik atau teratur. Dan dapat diketahui bahwasannya Allah menyukai suatu organisasi yang memiliki manajemen baik dan dengan pengelolaan yang baik, diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh.

Sebagai organisasi Madrasah, Madrasah berfungsi membina SDM yang kreatif dan inovatif bukan saja peserta didiknya, tetapi juga tenaga pendidiknya. Organisasi Madrasah harus menjadi model organisasi yang tepat untuk semua tingkatan, dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Manajamen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) harus dibarengi pula oleh peningkatan mutu dan menerapkan manajamen yang berorientasi pada mutu dan perbaikan yang berkesinambungan. Kegagalan dalam memperbaiki mutu pendidikan akibat manajamen yang lemah akan menimbulkan kegagalan generasi baik dalam makro maupun dimensi mikro. Oleh karena itu, manajemen Madrasah harus mengembangkan kreatifitas, inovasi, modernisasi, dan terfokus pada pelanggan pendidikan.¹¹

Dalam kaitan ini, munculah salah satu pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada Madrasah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalannya disebut Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), yang telah berhasil mengangkat komisi dan memecahkan berbagai masalah

¹⁰ Imam Ghazali Dkk, *Al Mumayyaz Alquran tajwid warna transliterasi Per kata*, (Bekasi : Cipta bagus segara, 2014), h. 551.

¹¹ H.R.R Tilaar, kekuasaan dan pendidikan : *Manajamen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009),h. 309.

pendidikan beberapa negara maju, seperti Australia dan Amerika.¹²

Tujuan umum Manajemen Berbasis Madrasah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan Madrasah melalui pemberian kewenangan kepada Madrasah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada Madrasah untuk mengelola sumber daya Madrasah dan mendorong partisipasi warga Madrasah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama Manajamen Berbasis Madrasah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.¹³

Terdapat beberapa konsep dalam mendefinisikan manajamen berbasis madrasah yaitu :

1. Manajamen berbasis madrasah adalah strategi untuk mewujudkan Madrasah/madrasah yang efektif dan produktif.
2. Manajamen berbasis Madrasah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada Madrasah atau madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
3. Manajamen berbasis Madrasah adalah ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran.¹⁴

Berdasarkan konsep tersebut maka mendefinisikan manajemen berbasis madrasah ini merupakan suatu pengelolaan madrasah yang dianggap ideal dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Karan dengan konsep MBM ini madrasah diharapkan dapat mengelola institusinya secara otonom, transparan, dan partisipatif.

¹² Suparlan , *Op. Cit.* h.53.

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 7.

¹⁴ Hasan Anshori, *Pentingnya Manajamen Berbasis Madrasah*

Dalam kepemimpinan Madrasah efektif, (Tarbawi, Vol 2. No. 01, 2016), h. 27.

Menurut Jemenez dan Sawada menyimpulkan bahwa pelibatan masyarakat dan orang tua siswa (MBM) mempunyai dampak jangka panjang dalam meningkatkan hasil belajar. Dimmock dan Caldwell juga menemukan bahwa MBM memiliki lima keunggulan sebagai berikut.

1. MBM adalah lebih demokratis. MBM memungkinkan guru dan orang tua siswa dapat mengambil keputusan tentang pendidikan dengan cara-cara yang lebih demokratis daripada hanya sekedar memberikan kewenangan kepada orang-orang yang terbatas.
2. MBM adalah lebih relawan.
3. MBM adalah tidak birokratis.
4. MBM memungkinkan untuk lebih memiliki akuntabilitas
5. MBM memungkinkan untuk dapat memobilisasi sumber daya secara lebih besar.¹⁵

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas pada Madrasah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua *stakeholder*-nya, Madrasah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratik,kreatif, dan inovatif serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri (*self reform*). Artinya, dalam konteks ini, Madrasah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebab keputusan akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang utuh.

Adapun komponen yang didesentralisasikan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah komponen-komponen manajemen berbasis Madrasah, hal yang paling penting dalam pelaksanaan Manajamen Berbasis Madrasah adalah manajemen terhadap komponen-komponen Madrasah itu sendiri. Sedikitnya

¹⁵ Suparlan, *Op. Cit*, h. 57-58.

terhadap tujuh komponen Madrasah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBM, yaitu :

1. Manajemen kurikulum
2. Manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Manajemen keuangan dan pembiayaan
4. Manajemen sarana dan prasarana
5. Manajemen kesiswaan
6. Manajemen peran serta masyarakat
7. Manajemen layanan khusus¹⁶

Menurut Depdiknas, karakteristik yang harus dimiliki oleh Madrasah sebagai indikator pelaksanaan MBM yang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Input pendidikan
 - a) Memiliki kebijakan mutu
 - b) Sumber daya tersedia dan siap
 - c) Memiliki harapan dan prestasi yang tinggi
2. Proses
 - a) efektifitas proses belajar mengajar tinggi
 - b) kepemimpinan Madrasah kuat
 - c) Pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan
 - d) Madrasah memiliki budaya mutu
 - e) Madrasah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis
 - f) Madrasah memiliki kewenangan
 - g) Partisipasi warga Madrasah dan masyarakat
 - h) Madrasah memiliki kewenangan
 - i) Madrasah memiliki kemauan untuk berubah
 - j) Madrasah melaksanakan evaluasi dan perbaikan dan berkelanjutan
 - k) Madrasah responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan
 - l) Madrasah memiliki akuntabilitas
 - m) Madrasah memiliki sustainabilitas
3. Output

¹⁶ E. Mulyasa, *Op, Cit*, h. 39.

Output dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output berupa prestasi non akademik.¹⁷

Alasan memilih Ma. Ma'arif Keputran sebagai tempat penelitian didasarkan beberapa hal, yaitu pertama, Ma. Ma'arif Keputran merupakan satu satunya madrasah aliyah di Kalianda, ditandai dengan prestasi yang baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kedua, ada banyak ekstrakurikuler di Madrasah tersebut, meliputi pramuka, tari, TPA, olahraga, music dan lain lain. Ketiga prestasi akademik berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kelulusan mencapai 100%. Keempat, kondisi fisik bangunan dari tahun ke tahun dan berdasarkan observasi penelitian ke lokasi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.

Hasil pra penelitian di Ma. Ma'arif Keputran menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan MBM di Ma. Ma'arif Keputran dengan harapan siswa, guru-guru, karyawan dan masyarakat sudah cukup memuaskan walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan MBM.

Manajemen berbasis madrasah yang di terapkan di Ma. Ma'arif Keputran sudah mengikuti standar MBM pada secara umum yang mana kepala madrasah mendorong partisipasi warga Madrasah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti halnya membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntunan kehidupan masyarakat, kepala Madrasah melakukan perawatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan diMadrasah, memberikan motivasi dan menghimpun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang berupa ide, gagasan, aspirasi, dana, tenaga, materi dan lain lain.

Oleh karena itu kualitas pelayanan dapat dikatakan sudah cukup memuaskan karena sudah dapat memenuhi harapan staff, masyarakat, dan siswanya. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan MBM yang diberikan dengan seadanya, namun bagaimana bias tujuan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

¹⁷ Jufri Dolong, *Op. Cit*, h. 9.

Persaingan dalam dunia pendidikan yang semakin ketat dengan bermunculan Madrasah Madrasah yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ma. Ma'arif Keputran sudah dapat menyesuaikan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan yang kebijakan-kebijakannya terus mengalami perubahan dan perbaikan.

Pegawai pada lingkup Madrasah Ma. Ma'arif Keputran selalu di tuntut dan diberi arahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan dan harus lebih professional dalam memberikan kepuasaan kepada masyarakat. Pihak Madrasah juga selalu melakukan strategi-strategi agar mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi dari masyarakat serta dapat memberikan kualitas manajemen yang baik bagi siswanya.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang peniliti lakukan di Ma. Ma'arif Keputran didapatkan data tentang pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (MBM) dan peran komite madrasah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Pelaksanaan Manajemen Bebas Madrasah (MBM) di Ma. Ma'arif Keputran

NO	Indikator	Sub Indikator
1	Manajemen Kurikulum	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penilaian
2	Manajemen Tenaga kependidikan dan pendidik	1. Menggerakkan 2. Mengarahkan 3. Membimbing 4. Membina 5. Memotivasi
3	Manajemen keuangan dan pembiayaan	Sumber Keuangan dan Pembiayaan 1. Bos 2. Komite
4	Manajemen sarana dan prasarana	1. Sarana (Gedung, ruang kelas, kursi, media pengajaran dll) 2. Prasarana (Halaman, kebun, jalan menuju Madrasah dll)

5	Manajemen peran serta Masyarakat	Kegitan atau program belajar mengajar yang berhubungan dengan masyarakat
6	Manajemen pelayanan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Bimbingan 2. Layanan Kesehatan 3. Layanan Kantin Madrasah
7	Manajemen kesiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input 2. Output 3. Ruang Lingkup Kesiswaan (Kepramukaan, Osis dan Ekstrakurikuler)

Tabel 1.3
Data Prestasi Akademik dan Non Akademik Ma. Ma’arif Keputran
Tahun Ajaran 2021/2022

No	Jenis Kejuaraan/Lomba	Tahun	Tingkat	Keterangan
1	Lomba KSM Fisika	2022	Kabupaten	Juara 3
2	Robotik	2022	Sumbagsel	Juara 3
3	OSN Ekonomi	2022	Kabupaten	Juara 3
4	KSM Geografi	2022	Kabupaten	Juara 1, 2 dan 3
5	KSM Ekonomi	2022	Kabupaten	Juara 2 dan 3
6	KSM Biologi	2022	Kabupaten	Juara 1 dan 2
7	KSM Fisika	2022	Kabupaten	Juara 1
8	KSM Kimia	2022	Kabupaten	Juara 1
9	KSM Fisika	2022	Kabupaten	Juara 3
10	KSM Kimia	2022	Kabupaten	Juara 3
11	KSM Ekonomi	2022	Kabupaten	Juara 2 dan 3
12	KSM Geografi	2022	Kabupaten	Juara 1, 2 dan 3

Sumber : Ma. Ma’arif Keputran

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan Anggaran Keuangan Ma. Ma’arif Keputran tahun 2022	
	Dana Komite Madrasah (SPP)	Dana Pemerintah (BOS)
1	Kegiatan Madrasah	Pelaksanaan latihan ujian nasional 1 dan 2 kelas x

2	Kepegawaian	Pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan
3	Uang transport	Pelaksanaan Latihan Ujian Nasional 1 dan 2 kelas IX
4	Kesejahteraan/kesehatan	Pelaksanaan Latihan Ujian Madrasah kelas IX
5	Biaya kantor	Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Madrasah kelas IX
6	Pengadaan prasarana/sarana perbaikan dan pemeliharaan	Peningkatan prestasi bidang akademik
7	Pengadaan pakaian seragam siswa dan guru	Kegiatan pelaksanaan OSN dan KKM
8	Kesejahteraan guru dan karyawan Madrasah	Kegiatan review K13
9	Kegiatan organisasi/sosial agama	Pengembangan keprifadian peserta didik
10	Kegiatan kesiswaan	Workshop Kurikulum
11	Pelaksanaan ujian nasional dan Madrasah	Pengembangan standart proses proses pembelajaran, Standar Budaya dan Lingkungan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana.
12	Tunjangan tanggung jawab	Pengembangan standar pengelolaan, pembiayaan, penilaian,

Sumber : Ma. Ma’arif Keputran

Berdasarkan tabel diatas komite madrasah ikut terlibat dan memberikan masukan-masukan ketika pihak Madrasah akan mengadakan suatu program-program atau kegiatan-kegiatan di Madrasah. Dari hasil pra penelitian di Ma. Ma’arif Keputran penulis simpulkan bahwasannya manajemen berbasis madrasah di Ma. Ma’arif Keputran sudah baik yaitu sudah mengikuti langkah-langkah MBM pada umumnya, penerapan manajemen berbasis madrasah di Ma. Ma’arif Keputran yaitu meliputi :

1. Manajemen kurikulum

Kurikulum di Ma. Ma’arif Keputran menggunakan kurikulum 2013 dan dalam pengelolaannya sudah baik yang mana terdapat penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

2. Manajemen pendidik dan tenaga pendidik
Kepala Madrasah di Ma. Ma'arif Keputran sangat memperhatikan tenaga pendidik sehingga selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik agar selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya.
3. Manajemen kesiswaan
Manajemen kesiswaan di Ma. Ma'arif Keputran meliputi osis, kepramukaan dan ekstrakurikuler. Dan dalam penerimaan siswa-siswi baru terdapat dua tes yang harus dipenuhi, yaitu tes tertulis dan tes membaca alquran.
4. Manajemen keuangan dan pembiayaan
Sumber keuangan di Ma. Ma'arif Keputran terdapat dari 2 sumber yaitu Boss dan Komite. Dan pengelolaan komite dalam pembayaran dengan cara mengangsur menjadi 3x angsuran yaitu 50%, 35% dan 15%.
5. Manajemen sarana dan prasarana
Pengelolaan sarana dan prasarana di Ma. Ma'arif Keputran sudah baik karena selalu menjaga memelihara dan mengontrol sarana dan prasarana di Madrasah. Dalam pengelolaannya terdapat tiga yang dikerjakan yaitu, skala prioritas, sekala bukan prioritas dan isidental.
6. Manajemen hubungan masyarakat dengan Madrasah
Ma. Ma'arif Keputran memiliki kegiatan humas yang sangat unik, menarik dan baik yang mana kegiatan itu sangat membutuhkan masyarakat dan langsung terjun ke masyarakat, yaitu kegiatan yang dilakukan humas Ma. Ma'arif Keputran adalah kegiatan PPM (Pengabdian pada masyarakat) yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. Tugas siswa dalam kegiatan ini yaitu mengisi kultum di mushola/masjid, mengajar TPA, baksos dan lain-lain.
7. Manajemen layanan khusus
Ma. Ma'arif Keputran sangat memperhatikan layanan khusus yang diberikan sekoalah kepada siswa-siswinya, mulai dari toilet, perpustakaan, UKS, kantin dan layanan konseling.

Dari paparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di Ma. Ma’arif Keputran?”.

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajamen Berbasis Madrasah (MBM) di Ma. Ma’arif Keputran”

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangkulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁸”.

Menurut (Sayuti, 2022), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irsadul ‘Ibad. S.H.i selaku Kepala Ma. Ma’arif Keputran , M.Amin, SE selaku Ketua Komite Ma. Ma’arif Keputran dan Drs. Ibrahim selaku Guru PAI

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2010) h.15.

¹⁹ Ahmad Sayuti, ‘Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan’, *Mubtadiin*, 2022, 45–56 <<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin>>.

diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap menjadi mitra yang harus bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis madrasah (MBM). Karena tanpa manajemen yang baik tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Didukung oleh seorang guru kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan organisasi sekolah yang berkualitas dan professional.²⁰ Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis madrasah (MBM) yang memberikan kewenangan penuh (otonomi) kepada madrasah dan guru dalam mengatur pendidikan. Konsep MBM juga merubah sistem pembelanjaan anggaran semaksimal mungkin menjadi pemakaian anggaran seefisien mungkin. Sehingga komite madrasah diharapkan mampu bekerjasama dengan kepala madrasah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas madrasah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis madrasah dan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel

Pembentukan komite madrasah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras dengan konsepsi berbasis masyarakat. Yang mana kini konsep manajemen berbasis madrasah bukan hanya sebagai wacana saja akan tetapi sudah diterapkan di Negara Indonesia. Secara umum, manajemen berbasis madrasah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwasan kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan pengusaha dsb). Untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Budi Waluyo, ‘Manajemen Upaya Peningkatan Komitmen Kerja Guru’, *An-Nur*, 8 (2022), 1–9 <<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/166>>.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka madrasah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola madrasahnya, sehingga lebih mandiri. Dengan kemandirianya, madrasah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitasnya/ keluwesannya, madrasah lebih atraktif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya madrasah secara optimal. Demikian juga dengan partisipasi/ keterlibatan warga madrasah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan madrasah, maka rasa memiliki mereka terhadap madrasah dapat ditingkatkan.

Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkatkan dedikasi warga madrasah. Inilah esensi warga madrasah dan masyarakat dalam pendidikan dan pembangunan madrasah harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan bersama. Baik dalam peningkatan otonomi madrasah, fleksibilitas sumber daya madrasah maupun partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah tersebut, kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Peran Komite Madrasah Di Ma. Ma’arif Keputran

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Amin, SE. Selaku Ketua Komite Madrasah diperoleh informasi bahwa peran komite madrasah merupakan kemampuan kerja komite madrasah, peran ini juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan komite madrasah yang tertuang dalam anggaran dasar komite madrasah. Peran komite madrasah dapat dilihat dari kemampuan dan hasil kerja komite madrasah dalam kinerjanya.

Data hasil penelitian di lapangan bahwa komite madrasah telah melaksanakan peranannya dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik madrasah, Kegiatan akademik siswa terkait prestasi dan pengembangan bakat

siswa, kejuaraan/olimpiade hingga kerjasamanya dengan sister school di luar negeri dengan tujuan agar mampu mewujudkan Misi dan Visi dari Ma. Ma'arif Keputran . Tidak hanya kompetensi dari siswa saja yang dikembangkan oleh Ma. Ma'arif Keputran , melainkan kompetensi guru yang mengajar juga menjadi perhatian, mengingat Ma. Ma'arif Keputran merupakan madrasah RSBI dengan menuntut intelektualitas yang tinggi menjadikan guru sebagai partner siswa harus meningkatkan kemampuan akademisnya. Hal ini dapat dilihat dari lulusan guru-guru yang mengajar di Ma. Ma'arif Keputran memiliki latar pendidikan beragam dari mulai S2 maupun S1. Selain itu guru-guru di Ma. Ma'arif Keputran juga diimbau agar meningkatkan kompetensinya dalam bahasa inggris, baik melalui workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang mampu menunjang kompetensi guru yang bersangkutan. Untuk Hal-hal yang bersifat nonakademik ini meliputi pembangunan sarana-prasarana yang diharapkan mampu menunjang pendidikan yang bersifat akademis. Misalnya Adanya gedung-gedung baru seperti laboratorium komputer dan juga lapangan basket yang merupakan kerjasama madrasah dengan pihak komite. Adanya gedung tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pendidikan akademisnya.

Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) sudah cukup baik dalam menjalankan perannya, mulai pemberian masukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Komite madrasah juga memberikan pertimbangan kepada madrasah terkait dengan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk madrasah. Dalam peningkatan mutu guru, komite madrasah juga memberikan pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Komite Madrasah dalam melakukan peran sebagai badan pendukung (*Supporting Agency*) melakukan langkah-langkah yang cukup baik terutama terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk madrasah. Dengan adanya sarana-prasarana yang menunjang pendidikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengadaan

gedung baru Laboratorium komputer dan juga lapangan basket di madrasah.

Komite Madrasah dalam melakukan peran pengontrol (*controlling agency*). Hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu pemantauan terkait dengan hasil belajar siswa juga dilakukan oleh komite madrasah. Akan tetapi untuk pemantauan proses KBM di dalam kelas belum pernah dilakukan oleh komite madrasah di Ma. Ma'arif Keputran karena Komite tidak bersinggungan langsung dengan guru yang mengajar akan tetapi pada kepala madrasah.

Peran komite madrasah sebagai mediator atau penghubung dalam pengelolaan sumberdaya pendidikan masih kurang berperan. Sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik uang komite madrasah atau iuran rutin orang tua siswa secara bulanan, serta iuran pembangunan/ pengembangan madrasah pada awal diterima di madrasah. Peran Komite madrasah dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat, supaya aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Ma. Ma'arif Keputran belum berjalan secara maksimal. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite madrasah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada madrasah.

Lebih lanjut M. Amin, SE menjelaskan bahwa hingga saat ini masih ada sedikit masalah terkait peran komite madrasah dari pandangan sebagian orang tua siswa (masyarakat). Mereka menilai belum ada keseragaman antara pihak komite madrasah dengan orang tua siswa, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, masih beranggapan bahwa peran dari komite madrasah masih berkutat pada pengadaan dana untuk madrasah dalam rangka pembangunan fisik madrasah. Bahkan pihak komite madrasah lebih bersifat “pro” pada pihak madrasah, sehingga peran komite sebagai

mediator kurang dapat tersalurkan dengan baik. Sebaiknya pihak komite madrasah itu sendiri bersikap “*balance*” dalam artian seimbang atau tidak berat sebelah antara lebih pro kepada pihak madrasah ataupun pada orang tua siswa. Akan tetapi harus mampu merangkul keduanya demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah mulai dari merancang program-program madrasah hingga anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan program-program yang sudah direncanakan.

Meskipun demikian hasil dari kinerja komite madrasah di Ma. Ma’arif Keputran sudah dapat dilihat dan di rasakan, fasilitas-fasilitas madrasah sangat lengkap dan nyaman membuat siswa lebih menikmati kegiatan akademis maupun kegiatan non akademis. Mulai dari kegiatan belajar, olimpiade dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penyaluran bakat siswa juga diupayakan dengan baik oleh komite madrasah. Demi terciptanya Visi dan Misi madrasah yang mana lebih jauh lagi mampu memberikan kepercayaan pada masyarakat luas bahwa Ma. Ma’arif Keputran memang memiliki predikat madrasah yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari lulusan Ma. Ma’arif Keputran yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga ada yang melanjutkan studi ke luar negeri. Semua itu berjalan bukan saja kinerja dari madrasah sendiri akan tetapi juga merupakan peran dari komite madrasah yang berkerja secara ikhlas untuk menjadi partner madrasah demi demi meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam lapangan terdapat kenyataan bahwa masyarakat lebih mengenal komite madrasah berperan seperti BP3 di masa lalu yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan pendidikan untuk membiayai program fisik madrasah dan kurang menyentuh program non fisik. Di lain hal terkait dengan kerjasama antar komite madrasah dengan dunia usaha dan dunia industri belum pernah dilaksanakan karena dana yang diberikan hingga saat ini hanya diperoleh dari iuran komite madrasah dan bantuan dari orang tua siswa seperti yang dikutip dari wawancara dengan M. Amin, SE, selaku ketua komite madrasah. Ia mengharapkan melalui wadah komite madrasah masyarakat semakin menyadari dan memahami tentang proses penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif

pada berbagai kegiatan dimadrasah untuk berkomitmen demi mewujudkan cita-cita bersama menjadi madrasah yang bermutu dan bahkan menjadi Madrasah Bertaraf Internasional).

Ahmad Musofa, S.Pd.I dan M. Amin, SE., sama-sama menyatakan bahwa sebenarnya Tugas Komite Madrasah tidak hanya sebagai penggalang dana seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat awam, tetapi berperan sebagai mediator antara pihak madrasah dengan masyarakat (orang tua siswa) dalam kegiatan madrasah. Komite madrasah juga mengadakan pertemuan-pertemuan formal meskipun tidak secara rutin dilaksanakan. Komite madrasah juga pernah diundang kepala madrasah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan rencana pengembangan madrasah (RPM). Program-program yang dibahas dan dikembangkan ini menunjukkan kecenderungan atau terfokus pada perbaikan fisik madrasah. Walaupun tidak semua komite madrasah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seseorang mengabdikan dirinya di sebuah organisasi komite madrasah.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Disamping itu, komite madrasah juga harus melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai peran keterlibatan komite madrasah melalui sosialisasi itulah diharapkan masyarakat mengerti, mengetahui dan memahami sekaligus dapat memantau kinerja komite madrasah. Agar peran komite madrasah dapat berjalan optimal dan “tidak berat sebelah”, maka langkah /upaya sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua siswa harus selalu dibina dan dikembangkan. Manajemen Berbasis Madrasah memiliki karakteristik yang harus dipahami oleh Madrasah yang menerapkan. Karakteristik Manajemen Berbasis didasarkan atas input, proses, dan output. Pada dasarnya perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi dalam

pengelolaan Pendidikan yang baik akan mampu mencapai tujuan Pendidikan Islam yang diharapkan.²¹

C. Kesimpulan

Berdasarkan Seluruh rangkaian proses penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

Peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*Advisory agency*) Peran ini diwujudkan dalam bentuk memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh madrasah, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan rang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang kelas. Selain itu, komite madrasah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBM, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbaiki bagi pengembangan madrasah.

Peran komite madrasah sebagai badan pendukung (*Supporting agency*). Peran ini diwujudkan dalam bentuk memberikan dukungan (*supporting agency*) dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Ma'arif Keputran berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.

Peran Komite madrasah sebagai badan pengontrol (*Controlling agency*). Peran ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di madrasah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di madrasah, komite madrasah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di madrasah yang didasarkan pada perkembangan prestasi secara periodik.

²¹ Andi Warisno, ‘Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam’, *An Nida*, 1 (2021), 1–8 <<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/jp1%0AStandar>>.

Peran komite madrasah sebagai Mediator. Peran tersebut diwujudkan dengan menjadi mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak madrasah serta turut serta memasyarakatkan kebijakan madrasah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang (*Stake holders*).

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2003, *Pedoman komite sekolah (Direktorat jendral kelembagaan Agama Islam)*.

Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007, *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007 – 2009*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2010, *Undang- undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta.

E. Mulyasa, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

E. Mulyasa, 2007, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

E. Mulyasa, 2006, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

E. Mulyasa, 2009, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara

Hasbullah, 2007, *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H.R.R Tilaar, 2009, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kepmendiknas nomor 044/u/2002.

Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, 2003, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah* Jakarta: Sinar Grafika.

Lexy J, Moeleong, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta:Ar-ruzz Media.

Nana Sudjana dan Ibrahim, 2012, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru.

Nurul Zuriah, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sayuti, Ahmad. PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN', *Mubtadiin*, 2022, 45–56
<https://journal.annur.ac.id/index.php/mubtadiin> diakses 25 Mei 2022

Suparlan, 2014, *Manajamen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi aksara.

Sri Nurabdiah Pratiwi, 2017, *Manajamen Berbasis Sekolah*, (Jurnal Edutech vol. 2 No.1).

Sri Rerani Pantjastuti, 2008, *Komite Sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing.

- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsini Arikunto, 2013, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka cipta.
- Syukur Fatah, 2011, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim penyusun, 2002, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. Tim Redaksi Sinar Grafika, 2011, Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Uno Hamzah B, 2007, Profesi Kependidikan Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waluyo, Budi, ‘MANAJEMEN UPAYA PENINGKATAN KOMITMEN KERJA GURU’, *An-Nur*, 8 (2022), 1–9
<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/166> diakses 20 April 2022
- Warisno, Andi, ‘Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam’, *An Nida*, 1 (2021), 1–8 <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/jp1%0AStandar> diakses 13 Februari 2022
- Wirawan, 2012, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Model, Aplikasi dan Profesi*, Jakarta: Rajawali Pers.